

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Sosialisasi merupakan proses dalam masyarakat baik yang masih tradisional, sedang berkembang, ataupun modern dan sebagai sarana atau cara yang dilakukan masyarakat untuk mengenal bermacam peran sosial. Jika dikaitkan dengan politik, sosialisasi merupakan proses yang berkesinambungan dengan fenomena-fenomena politiknya yang relevan. Terdapat beberapa unsur keberhasilan dalam sosialisasi politik yaitu agen sosialisasi politik, materi sosialisasi politik, mekanisme sosialisasi politik, dan pola sosialisasi politik. Dari penjelasan data sekunder dan informasi wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan pemanfaatan media sosial oleh KPU Sumatera Barat sebagai sarana sosialisasi periode 2020-2024 sudah melakukan perannya dengan baik menggunakan media sosial sebagai sarana sosialisasi. Meskipun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi KPU Sumatera Barat, jika dilihat dari empat unsur yang dikemukakan oleh Michael Rush dan Phillip Althoff.

Pertama, agen sosialisasi politik, dimana KPU Provinsi Sumatera Barat dan media sosial berpengaruh dalam kegiatan sosialisasi politik. KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki peran penting dalam sosialisasi politik pada tiap tingkatan KPU, mulai dari KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memiliki kewajiban dalam menyukseskan setiap penyelenggaraan pemilu. Tugas dan kewajiban terkait sosialisasi dan penyampaian informasi tersebut diatur dalam

peraturan KPU tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat. Pada konteks pemilu di era digital ini media sosial menjadi sarana yang efektif dalam menyampaikan informasi kepiluan karena mampu menjangkau masyarakat luas dengan cepat dan interaktif. Meskipun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi KPU Sumatera Barat dalam melakukan sosialisasi terutama melalui media sosial, yaitu kurangnya pengelolaan serius pada akun media sosial KPU dan minimnya SDM yang kompeten di KPU Sumbar dalam mengelola media sosial, masalah kreatifitas, keterbatasan peralatan pada tahun 2020 sehingga mengajukan anggaran ke KPU RI pada akhir tahun 2022, dan kendala dari masyarakat ialah tidak semua orang atau pemilih menggunakan media sosial dan informasi yang diberikan KPU Sumatera Barat melalui media sosial belum tentu dapat dipahami dengan baik.

Kedua, materi sosialisasi politik, dimana pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap politik yang berkembang di masyarakat melalui pemanfaatan media sosial. KPU menyiapkan konten dan mengunggahnya secara konsisten di akun-akun official KPU dalam bentuk foto, video, infografis, kuis, siaran langsung, dan konten lainnya. KPU juga menyampaikan sosialisasi, informasi, dan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Konten yang disajikan KPU Sumatera Barat di media sosial sudah menggambarkan informasi penting terkait pemilu, tetapi tetap perlu disampaikan dengan cara yang lebih santai agar masyarakat dapat memahami dengan mudah dan tidak merasa bosan dengan apa yang disampaikan oleh KPU tersebut.



Ketiga, mekanisme sosialisasi politik yang terdiri atas imitasi, instruksi, dan motivasi. Terkait dengan sosialisasi politik KPU Sumatera Barat lebih tepat terkait memberi instruksi dan memotivasi masyarakat dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. KPU Sumatera Barat berupaya menyajikan informasi-informasi dalam bentuk konten-konten yang berisikan edukasi mengenai pemilu melalui media sosial agar masyarakat dapat dengan mudah dan cepat.

Kemudian, pola sosialisasi politik dimana proses sosialisasi yang berkesinambungan yang dilakukan oleh KPU Sumatera Barat sehingga masyarakat dapat paham apa yang disosialisasikan. Penyampaian informasi yang berkelanjutan tentang pentingnya pemahaman partisipasi dalam pemilu memerlukan pendekatan yang bervariasi, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan berbagai lapisan masyarakat. Pendekatan melalui media sosial semakin gencar dilakukan, sosialisasi media sosial dengan menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, X (Twitter), dan TikTok untuk menjangkau masyarakat luas dengan konten-konten yang menarik dan tidak membosankan.

Berdasarkan unsur-unsur sosialisasi politik yang dikemukakan oleh Michael Rush dan Philip Altfoff, peneliti menilai bahwa poin-poin penting yang disampaikan oleh KPU Sumatera Barat melalui media sosial itu bergantung kepada cara penyampaian yang dilakukan oleh KPU Sumatera Barat sendiri, baik dalam penggunaan kalimat maupun bentuk konten dalam penyampaian informasi terkait pemilu. KPU Sumatera Barat telah menjalankan perannya dengan baik dalam menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dan dapat dibuktikan

pada tahun 2023 lalu, KPU Sumatera Barat mendapat penghargaan terbaik II dalam mengelola sosial KPU se-Indonesia. Saat ini informasi yang disampaikan melalui media sosial sudah cukup membantu masyarakat dalam mendapatkan pengetahuan penting terkait pemilu, namun penyajian dan interaksi dengan masyarakat masih perlu dimaksimalkan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti jabarkan serta merujuk pada penelitian terkait unsur-unsur keberhasilan sosialisasi politik KPU Provinsi Sumatera Barat, maka peneliti memiliki saran teoritik maupun saran praktis sebagai berikut:

1. Berdasarkan unsur yang mempengaruhi keberhasilan sosialisasi politik yaitu agen sosialisasi politik, materi sosialisasi politik, mekanisme sosialisasi politik dan pola sosialisasi politik yang dikemukakan oleh Michael Rush dan Phillip Altoff, yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian pada pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Maka peneliti menyarankan bahwa perlu penelitian lebih lanjut mengenai pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat karena masih terdapat beberapa kendala yang ada dalam menyampaikan informasi mengenai pemilu kepada kalangan masyarakat.
2. Saran untuk Komisi Pemilihan Umum terkait pemanfaatan ini mencakup peningkatan keterampilan dan kapabilitas termasuk kuantitas tim KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menghasilkan konten yang menarik dan relevan bagi berbagai kelompok pemilih. Konten yang kreatif dan bervariasi

seperti video pendek, infografis, dan siaran langsung dapat meningkatkan minat dan keterlibatan masyarakat, terutama di kalangan pemilih muda yang aktif di media sosial. Selain itu peningkatan literasi digital masyarakat harus ditingkatkan agar masyarakat lebih kritis dalam mengonsumsi informasi yang beredar di media sosial. Dengan mengadopsi pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif KPU dapat memaksimalkan potensi media sosial dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat.

